

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP
KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
SOPPENG TAHUN 2013-2022**

SKRIPSI



MUHAMMAD ISHAK

105731109019

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

MAKASSAR

2023

KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA

JUDUL PENELITIAN:

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP
KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
SOPPENG TAHUN 2018-2022**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Oleh:

MUHAMMAD ISHAK

NIM: 105731109109

*Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Pada Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah
Makassar*

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2023**

HALAMAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah ia berilmu.
Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah ia berilmu.
Barang siapa yang menginginkan keduanya (dunia dan akhirat) maka
hendaklah ia berilmu.

(HR Ahmad)

PERSEMBAHAN

*Rodhitu billahi rabba wa bil islami dina wabi muhammadin nabiyya
warasulaa.*

Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku tercinta yang telah mendidik dari kecil hingga dewasa sekarang, terima kasih atas pengorbanannya selama ini.

PESAN

Sipakatau, Sipakainge, Sipakalebbi



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap
Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten
Soppeng Tahun 2013-2022

Nama Mahasiswa : Muhammad Ishak
No. Stambuk/NIM : 105731109019
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

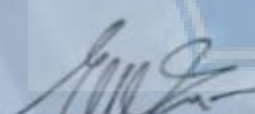
Menyatakan bahwa penelitian ini telah diperiksa dan diujikan disepan panitia
penguji seminar hasil Strata satu (S1) pada tanggal 14 Juli 2023 di program studi
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

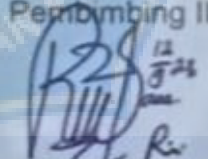
Makassar, 22 Juli 2023

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Endang Winarsih, S.E., M.Ak
NIDN: 0913029101

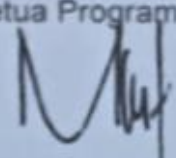

Rini Sulistiyanti, S.E., M.Ak
NIDN: 0909118703

Mengetahui,

Dekan

Ketua Program Studi


Dr. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NBM: 651 507


Mira, S.E., M.Ak., Ak
NBM: 128 6844





**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama: Muhammad Ishak, NIM: 105731109019 diterima dan disahkan panitia ujian skripsi berdasarkan surat keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor. 0010/SK-Y/62201/091004/2023, tanggal 11 Muharram 1445/29 Juli 2023 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana akuntansi pada program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 21 Muharram 1445 H
08 Agustus 2023 M

PANITIA UJIAN

- | | | |
|------------------|--|---------|
| 1. Pengawas Umum | Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag | (.....) |
| 2. Ketua | Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si | (.....) |
| 3. Sekretaris | Agusdiwana Suarni, S.E., M.Acc | (.....) |
| 4. Penguji | 1. Dr. Muryani Arsal, S.E., MM., AK., CA | (.....) |
| | 2. Muttiarni, S.E., M.Si | (.....) |
| | 3. Abdul Salam HB., S.E., M.Si., AK, CA | (.....) |
| | 4. Andi Arman, S., M.Ak., CA | (.....) |

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



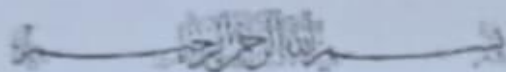
Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si

NBM: 651 507



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar



SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya bertanda tangan dibawah ini:

- Nama : Muhammad Ishak
- Stambuk : 105731109109
- Program Studi : Akuntansi
- Judul Skripsi : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemadirian Keuangan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2013-2022.

Dengan ini menyatakan bahwa

Skripsi yang saya ajukan didepan tim penguji adalah asli hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 21 Muharram 1445 H
08 Agustus 2023

Sebuat pernyataan,



Muhammad Ishak
NIM: 105731109019



Dekan,

Dr. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NBM: 651 507

Ketua Program Studi,

Mira, S.E., M.Ak., Ak
NBM: 128 6844

vii

**HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR**

Sebagai civitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Ishak

NIM : 105731109019

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar Hak dan Royalti Noneksklusif (*Nonexclusif Royalti Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2013-2022

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makasar berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama mencamtumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Makassar, 21 Muharram 1445 H
08 Agustus 2023

buat pernyataan



Muhammad Ishak
NIM: 105731109019



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt atas segala kenikmatan tiada henti-hentinya yang diberikan kepada hambanya walaupun dalam kehidupan sehari-hari kita selalu berbuat kemaksiatan dan bergelimang dengan dosa. Shalawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Saw, keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga dengan seringnya kita bershalawat kita mendapatkan syafaatnya diakhirat kelak dan bisa bersama baginda nabi di surganya Allah Swt. salah satu nikmat Allah yang diberikan kepada penulis yaitu dapat membuat skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Soppeng tahun 2018-2022”**

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewah dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhitung kepada kedua orang tua penulis **Hatibe** dan **Rusdiah** yang senantiasa memberikan semangat, dorongan, kasih sayang, doa dan masih banyak lagi yang tidak bisa tergambarkan untuk menyelesaikan akhir studi ini dan saudara kandung, sepupu dan keluarga saya yang senantiasa memberikan nasehat, dukungan dan bantuan materi dalam menyelesaikan studi ini. Semoga apa yang telah diberikan bernilai ibadah disisi Allah Swt dan mendapatkan balasannya baik didunia maupun diakhirat kelak.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya yang disampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Mira, S.E., M.Ak., Ak selaku ketua Prodi Akuntansi Unismuh Makassar Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Endang Winarsih, S.E., M.Ak selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini bisa selesai dengan baik.
5. Ibu Rini Sulistiyanti, S.E., M.Ak yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi sampai Ujian skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Unismuh Makassar yang senantiasa meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dengan penulis selama perkuliahan.
7. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang bantuan dan dukungannya selama perkuliahan.
8. Rekan-rekan IMPS Unismuh Makassar, selaku tempat pertama yang memberikan arahan saat pertama memasuki dunia kampus.
9. Kakanda BPH Autentik, Kakanda BPH Berkemajuan dan rekan-rekan IMM Soppeng dan IMM Unismuh yang selama masa perkuliahan banyak memberikan pengalaman dan pelajaran.
10. Seluruh kerabat yang tidak bisa saya tuliskan satu persatu yang memberikan bantuan dan dukungan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari penulisan skripsi masih sangat jauh dari kata kesempurnaan, maka dari itu penulis senantiasa mengharapkan saran dan

kritikannya atas skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya Bagi kampus biru Unismuh Makassar dan Kabupaten Soppeng.

Billahi Fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Makassar, Juni 2023

Penulis,

Muhammad Ishak



ABSTRAK

Muhammad Ishak. Tahun 2023. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2013-2022. Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Ibu Endang Winarsih dan Ibu Rini Sulistiyanti.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah kabupaten soppeng tahun 2013-2022. Jenis penelitian yang dilakukan adalah Kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari BPKPD Kabupaten Soppeng. Pengujian analisis data menggunakan analisis regresi linier sederhana dengan menggunakan aplikasi SPSS 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, berdasarkan uji statistik t dari pendapatan asli daerah adalah 3,508 lebih besar dari nilai t tabel dengan jumlah 1,85955 dan nilai signifikan sebesar $0,08 > 0,05$ maka hipotesis ditolak atau dengan kata lain dapat dikatakan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Artinya semakin banyak pendapatan asli daerah yang diperoleh suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian daerah begitu sebaliknya jika semakin tinggi transfer pusat yang diterima daerah maka semakin rendah tingkat kemandirian.

Kata Kunci : *Pendapatan Asli Daerah, Kemandirian Keuangan Daerah*



ABSTRACT

Muhammad Ishak. Year 2023. *The Effect of Local Original Income on the Financial Independence of Daeah Soppeng Regency in 2013-2022.* Thesis of the Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Guided by Main Supervisor Mrs. Endang Winarsih and Co Supervisor Mrs. Rini Sulistiyanti.

This study aims to determine the effect of local original income on the regional financial independence of Soppeng Regency in 2013-2022. The type of research conducted was Quantitative using secondary data obtained from BPKPD Soppeng Regency. Data analysis testing using simple linear regression analysis using SPSS 26 application. The results showed that, based on the statistical test t of regional original income is 3,508 greater than the table t value with a total of 1.85955 and a significant value of $0.08 > 0.05$, the hypothesis is rejected or in other words it can be said that regional original income affects regional financial independence. This means that the more local original income obtained by a region, the higher the level of regional independence, vice versa, if the higher the central transfer received by the region, the lower the level of independence.

Keywords : Local Original Income, Regional Financial Independence.



DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN	vi
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	vii
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penleitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6

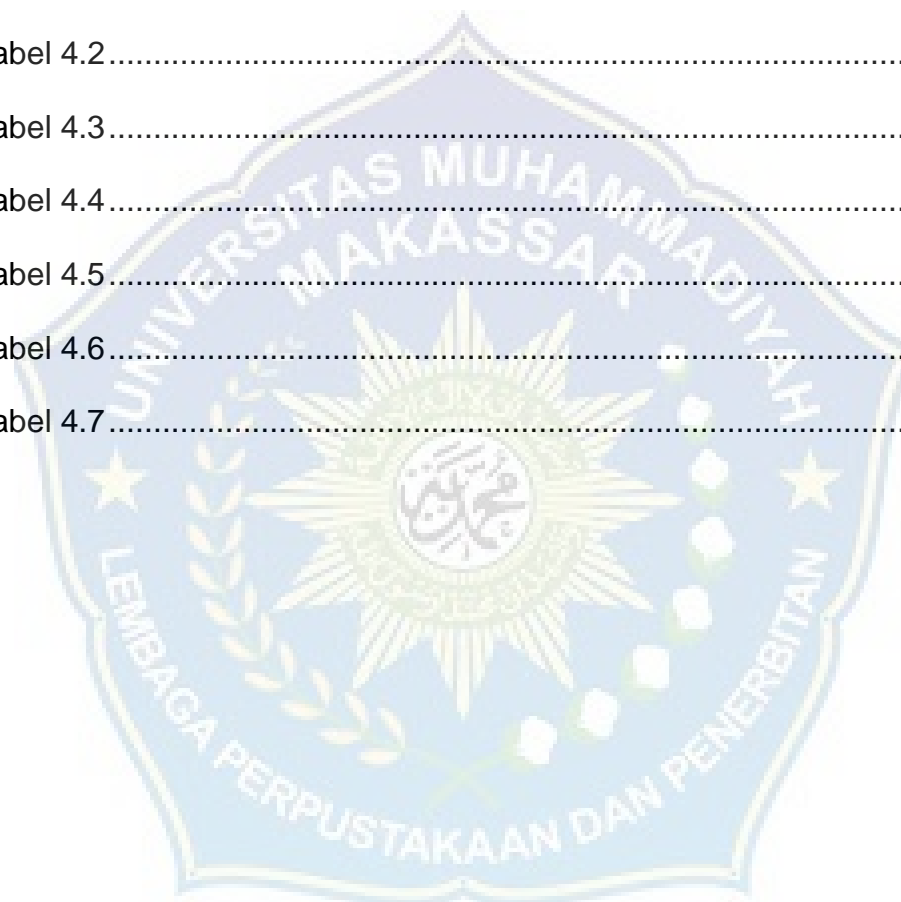
A. Tinjauan Teori	6
1. Pendapatan Asli Daerah	6
2. Kemandirian Keuangan Daerah.....	10
B. Penelitian Terdahulu.....	13
C. Kerangka Pikir	24
D. Hipotesis	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
A. Jenis Penelitian	26
B. Lokasi Penelitian	26
C. Jenis dan Sumber Data	26
D. Populasi dan Sampel.....	27
E. Teknik Pengumpulan Data	27
F. Defenisi Operasional Variabel	27
G. Metode Analisis Data.....	28
H. Uji Hipotesis	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Gambaran Umum Objek penelitian.....	32
B. Hasil Penelitian.....	41
C. Hasil Analisis Data.....	44
D. Pembahasan	50
BAB V PENUTUP	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA.....54



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	3
Tabel 2.1	11
Tabel 2.2	13
Tabel 4.1	41
Tabel 4.2	42
Tabel 4.3	44
Tabel 4.4	46
Tabel 4.5	47
Tabel 4.6	48
Tabel 4.7	49



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	24
Gambar 4.1	45
Gambar 4.2	45
Gambar 4.3	47



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang dan yang wilayahnya cukup luas, membutuhkan sebuah sistem pemerintahan yang baik. Sistem ini sangat dibutuhkan setidaknya dua hal: pertama sebagai alat untuk melaksanakan berbagai alat untuk melaksanakan berbagai pelayanan publik di setiap daerah. Kedua sebagai Alat untuk masyarakat untuk dapat berperan dalam menentukan arah dan cara mengembangkan taraf hidupnya sesuai dengan peluang dan tantangan yang dihadapi. Masa Pemerintahan Orde baru, kerangka otoritas publik dengan sistem sentralisasi, yaitu berbagai kekuasaan diatur oleh pemerintah pusat. Dalam menyelesaikan roda pemerintahan dengan sistem sentralisasi, terjadi penyerahan penuh kekuasaan dan kekuatan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Hal ini menimbulkan masalah dalam melakukan perbaikan secara umum di setiap daerah. Karena adanya bentuk penyerahan wewenang maka pemerintah lebih fokus melakukan pembangunan yang lebih unggul di pusat dibandingkan dengan melakukan pembangunan di daerah yang sulit untuk di jangkau

Pengaruh yang dirasakan setiap daerah cukup besar, hal ini mempengaruhi tingkat perkembangan dan peningkatan keungan disetiap daerah. Melihat perbedaan tersebut mendorong pemerintah mengubah strategi yang ada, khususnya mengubah sistem sentralisasi menjadi desentralisasi. Sistem tersebut muncul sebagai strategi Otonomi daerah yang lahir dari ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang pelaksanaan otonomi daerah, pedoman, pembagian dan pendayagunaan kekayaan negara serta

keseimbangan perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam struktur negara republik Indonesia yang menjadi alasan dikeluarkannya peraturan UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah kemudian disegarkan menjadi UU No. 32 Tahun 2004 dan disegarkan kembali menjadi UU No. 23 Tahun 2014 dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan pemerintah daerah dan ditetapkan kembali menjadi UU No. 33 Tahun 2004

Pelaksanaan dengan sistem desentralisasi terkait dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah salah satunya adalah pengaturan kabupaten yang independen dan pertukaran kekuasaan yang sah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengolah pemerintahannya sendiri dan memberikan pintu terbuka yang luar biasa ke daerah untuk menyelidiki potensi ekonomi demi tercapainya kemandirian keuangan daerah.

Tujuan pemberlakuan otonomi daerah di Indonesia adalah untuk mencapai kemandirian keuangan daerah. kemandirian keuangan daerah yaitu kemampuan pemerintah daerah untuk mendukung serangkaian kegiatan pemerintah, perbaikan dan memberikan layanan kepada khalayak umum yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan lokal atau pendapatan asli daerah. Kemandirian daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah Kabupaten/Kota dapat disebut sebagai daerah yang mandiri jika pendapatan asli daerah yang diterima pemerintah daerah lebih besar dari pada bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat. dalam pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya fokus pada dana bantuan dari pusat berupa bentuk dana perimbangan saja. Namun yang lebih penting, daerah bisa mengelola rumah tangganya sendiri termasuk memanfaatkan

dan mengelolah seluruh potensi yang ada didaerah untuk pembangunan daerah.

Kabupaten Soppeng merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan mempunyai banyak potensi dari berbagai sektor seperti Sektor Pajak, Retribusi dan BUMD yang dapat berkontribusi sebagai sumber pendapatan asli daerah. Namun hal itu bukan berarti kabupaten Soppeng dapat membiayai sendiri seluruh kebutuhan daerahnya. Untuk mengatasi kesenjangan ini maka pemerintah mendistribusikan dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dalam bentuk dana perimbangan. Dana Perimbangan ini meliputi Dana Alokasi Umum dan dana Alokasi Khusus untuk mendanai kebutuhan daerah kabupaten Soppeng.

Tabel 1.1

**Tabel Penerimaan dana Perimbangan kabupaten Soppeng
Tahun 2013-2022**

Tahun	Dana Perimbangan
2013	Rp 598.157.576.584,00
2014	Rp 635.227.489.289,00
2015	Rp 741.164.342.734,00
2016	Rp 1.014.280.208.517,00
2017	Rp 927.905.872.664,00
2018	Rp 887.177.620.412,00
2019	Rp 899.763.975.382,00
2020	Rp 854.758.766.531,00
2021	Rp 970.643.355.351,00
2022	Rp 454.711.948.374,00

Sumber : <https://djpk.kemenkeu.go.id/>

Data yang diperoleh, menunjukkan tingkat penerimaan dana perimbangan kabupaten Soppeng tahun 2013-2022 terendah tahun 2022

sebesar Rp 454 milyar, tertinggi tahun 2019 sebesar Rp 1 Triliun . Jika dilihat hasil penerimaan dana perimbangan itu senantiasa mengalami naik turun dalam jumlah transfer dari pusat.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk membuat karya ilmiah berbentuk proposal dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2013-2022”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah kabupaten soppeng.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah kabupaten soppeng

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penyusunan penelitian ini diharapkan memberi manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung ke berbagai pihak yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan sumbangan pemikiran atau memperkaya wawasan, referensi dan ilmu pengetahuan terkait pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kemandirian daerah kabupaten Soppeng.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

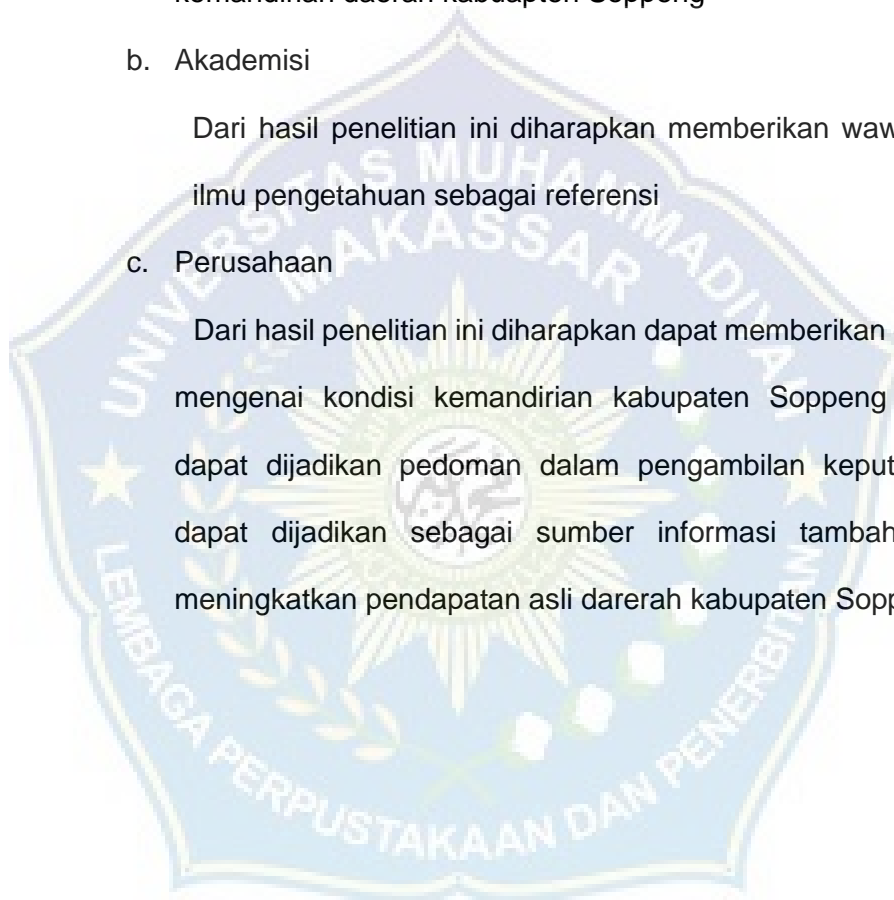
Sebagai objek pelatihan untuk menambawah wawasan dan ilmu pengetahuan terkait pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kemandirian daerah kabuapten Soppeng

b. Akademisi

Dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan sebagai referensi

c. Perusahaan

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi kemandirian kabupaten Soppeng sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan dapat dijadikan sebagai sumber informasi tambahan untuk meningkatkan pendapatan asli darerah kabupaten Soppeng.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah pendapatan asli daerah yang dihasilkan dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dirancang untuk memudahkan daerah mencari pendanaan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan sendiri, sebagai wujud dari asas desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004).

Pendapatan asli daerah mengacu pada pendapatan yang dihasilkan murni oleh daerah melalui optimalisasi sumber-sumber potensi pengelolaan kekayaan asli daerah dan partisipasi masyarakat setempat antara lain Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD dan lain-lain PAD yang sah (Vergina, 2017)

Sumber Pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 (1) UU No. 33 Tahun 2004 bersumber dari: Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah

a. Pajak Daerah

Pajak daerah dipungut berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000 mengenai pajak dan retribusi daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh perseorangan atau kepala organisasi ke kabupaten tanpa imbalan langsung, yang dapat dipaksakan sesuai dengan

undang-undang dan digunakan sebagai pendanaan dalam penyelenggaraan pemerintah di wilayah setempat.

Pajak daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda) dimana wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya dipakai dalam membiayai seluruh rangkaian kegiatan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan dan pembangunan di daerah. Di Indonesia jenis pajak terbagi menjadi dua yaitu pajak Provinsi dan pajak kabupaten/kota.

1. Jenis Pajak daerah yang dikelola provinsi:
 - a) Pajak kendaraan bermotor
 - b) Bea Balik nama kendaraan bermotor
 - c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
2. Jenis Pajak daerah yang dikelola kabupaten/kota:
 - a) Pajak hotel dan restoran
 - b) Pajak hiburan
 - c) Pajak reklame
 - d) Pajak penerangan jalan
 - e) Pajak parkir
 - f) Pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian
 - g) Pajak pemanfaatan air bawah tanah
 - h) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah berdasarkan UU. No. 34 Tahun 2000 terkait pajak dan retribusi daerah yaitu pungutan daerah untuk membayar layanan atau jasa tertentu yang diberikan pemerintah setempat sebagai kebutuhan organisasi.

Retribusi merupakan pembayaran wajib dari masyarakat kepada negara karena dengan adanya jasa tertentu yang diberikan negara kepada penduduknya secara perseorangan, jasa itu dapat dikatakan bersifat langsung yaitu bagi yang membayar retribusi yang dapat menikmati balas jasa dari negara. Yang menjadi objek retribusi adalah

1. Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang diberikan atau disediakan pemerintah daerah dengan tujuan kepentingan dan kemanfaatan publik yang mencakup:
 - a) Retribusi pelayanan kesehatan
 - b) Retribusi pelayanan kebersihan
 - c) Retribusi pergantian biaya cetak KTP
 - d) Retribusi pelayanan pemakaman
 - e) Retribusi pelayanan pasar
 - f) Retribusi pengujian kendaraan bermotor
 - g) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
 - h) Retribusi pengolahan limbah cair
 - i) Retribusi pelayanan pendidikan
 - j) Retribusi pengendalian menara komunikasi

2. Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah jika belum adanya fasilitas yang memadai oleh pihak swasta meliputi:

- a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- b) Retribusi pasar grosir dan pertokoan
- c) Retribusi tempat pelelangan
- d) Retribusi tempat khusus parkir
- e) Retribusi tempat penginapan
- f) Retribusi rumah potong hewan
- g) Retribusi pelayanan kepelabuhan
- h) Retribusi ketempat rekreasi dan olahraga
- i) Retribusi penyeberangan di air

3. Retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizina tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk peraturan dan pengawasan atas kegiatan yang meliputi:

- a) Retribusi izin mendirikan bangunan
- b) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
- c) Retribusi izin usaha perikanan

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Dari UU No. 33 tahun 2004 terkait dana perimbangan antara pusat dan daerah, perusahaan daerah adalah perusahaan yang berjalan di aspek jasa Keuangan, perbankan pabrik, agraria dll. bentuk penghasilan dari hasil penyelenggaraan kekayaan secara mandiri, antara lain:

- 1) Bagi hasil perusahaan milik daerah
 - 2) Bagi hasil lembaga perbankan
 - 3) Bagi hasil untuk institusi luar bank
- d. Lain-lain PAD yang sah

Lain-lain PAD yang sah mencakup:

- 1) Hasil pemasaran kekayaan daerah yang dipisahkan
- 2) Jasa Giro
- 3) Penerimaan bunga
- 4) Keuntungan perbedaan nilai tukar rupiah dengan mata uang asing
- 5) Bonus, bagian ataupun bentuk lain

Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan asli atau pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri yang dikelola di setiap daerah yang digunakan sebagai modal awal pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan usaha yang dilakukan daerah untuk memperkecil ketergantungan bantuan dana dari pemerintah pusat.

2. Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian Keuangan Daerah memperlihatkan kemampuan pemerintah daerah Kabupaten/kota untuk membiayai sendiri dari berbagai bentuk kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat yang membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang dibutuhkan daerah (Pantun bukit, 2022)

Semakin tinggi kemandirian keuangan daerah maka ketergantungan daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi

masyarakat setempat dalam pembangunan daerah, jika semakin kemandirian keuangan daerah memberikan gambar semakin tingginya bentuk kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah. Pajak dan retribusi daerah merupakan suatu komponen dari PAD. Kemandirian keuangan daerah dapat ditunjukkan dari perbandingan antara PAD dengan pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat (Indah S.N, 2022).

Kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan daerah untuk menyelidiki sumber daya potensial sehingga bisa mengurangi atau tidak bergantung pada kelompok yang berasal dari luar daerah. Keuangan daerah yang mandiri menggambarkan kapasitas pemerintah dalam membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah dengan memanfaatkan jenis pendapatan asli daerah (Malau, 2020).

Pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan, hubungan situasional dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu:

Tabel 2.1

Pola hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah

Kemampuan keuangan	Kemandirian %	Pola Hubungan
Sangat Rendah	0-25%	Instruktif
Rendah	25-50%	Konsultatif
Sedang	50-75%	Partisipatif
Tinggi	75-100%	Delegatif

Sumber: Adhiatmoko dalam Indah S.N, 2020

- a) Pola hubungan insruktif mengindikasikan peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada tingkat kemandirian daerah (Pemerintah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah)
- b) Pola hubungan konsultatif mengindikasikan campur tangan dari pemerintah pusat mulai berkurang karena mengaggap daerah sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah daerah
- c) Pola hubungan partisipatif mengindikasikan terkait peranan pemerintah pusat mulai berkurang, karena mengingat daerah terkait tingkat kemandiriannya mendekati mampu dlama menjalankan otonomi daerah
- d) Pola hubungan delegatif mengindikasikan campur tangan pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam menjalankan segala bentuk urusan otonomi daerah.

Tingkat Kemandirian daerah tinggi jika hasil pemasukan pendapatan daerah lebih tinggi, maka bentuk ketergantungan daerah semakin kecil pada pihak lain dalam hal ini pemerintah pusat. Tingkat kemandirian juga dapat menggambarkan tingkat keterlibatan masyarakat dalam melakukan pembangunan daerah, ketika tingkat kemandirian tinggi maka tinggi pula bentuk partisiapasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi sehingga menggambarkan tingkat Kesejahteraan masyarakat yang tinggi. Oleh karena itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemandirian daerah yaitu:

- a. Tingkat penerimaan pajak atau retribusi daerah yang masih rendah
- b. Tingkat administrasi pemungutan yang masih rendah
- c. Kemampuan perencanaan dan pengawasan masih rendah

- d. Potensi ekonomi daerah yang dikelola
- e. Kemampuan dinas pendapatan daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah

Kemandirian daerah condong pada kemampuan daerah untuk mengembangkan sumber daya potensial dengan mengecilkan atau tidak bergantung pada kelompok luar daerah. Daerah yang mandiri menandakan kapasitas pemerintah ketika menggunakan sumber pendapatan asli daerah untuk membiayai penyelenggaraan atau pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2
Penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti dan tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	Wike Nurliza Arpani dan Halmawati (2020)	Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal dan tingkat kemandirian keuangan.	X1: Pendapatan asli daerah. X2: Dana Perimbangan Y1: Belanja Modal. Y2: Kemandirian daerah.	<i>Structural Equation Modeling</i> (SEM).	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Dana Perimbangan berpengaruh Positif Terhadap tingkat Kemandirian

					Keuangan daerah.
2.	Siti Raun Kristina Amran T Naukoko Hanly F DJ Siwu (2021)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah	X1: Pendapatan asli daerah X2: Dana perimbangan Y: Kemandirian keuangan	Analisis Regresi Berganda	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh Positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, Sementara Untuk Dana Perimbangan berpengaruh negatif Terhadap Peningkatan Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah. dan Secara Bersamaan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh

					positif terhadap Peningkatan Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.
3.	Cindi Oktavia dan Nur Handayani	Pengaruh Pad, <i>Tax Effort</i> , Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah	X1: PAD X2: <i>Tax Effort</i> X3: Belanja Modal Y: Kemandirian keuangan pemerintah daerah	Analisis Regresi Linier Berganda	Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Positif Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Sedangkan <i>Tax Effort</i> Tidak Berpengaruh Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Dan Belanja Modal Menunjukkan Hasil Berpengaruh Negatif Terhadap Tingkat Kemandirian

					Keuangan Daerah.
4.	Afipah Fauzia Amalia N dan Haryanto (2019)	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian keuangan Daerah pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2017	X1: Pendapatan Asli daerah X2: Dana alokasi umum X3: Belanja modal Y: Kemandirian keuangan daerah	Analisis Statistik Deskriptif	1)Pendapatan asli daerah Memiliki pengaruh Yang signifikan positif terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah., 2) Dana Alokasi Umum Memiliki Pengaruh Yang Signifikan Negatif Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.
5.	Mohamad Wasil, Nika Syahdila Putri, Ayu Larasati Dan Nurliana Mufida	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sidoarjo	X1: Pendaptan Asli Daerah X2: Dana perimbangan Y: Kemandirian keuangan daerah	Analisis Regresi Linier Berganda	Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Positif dan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, Dana Perimbangan Berpengaruh Negatif Dan

					Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Secara Simultan Berpengaruh Positif Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
6.	Pantun Bukit (2022)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/ Kota Provinsi Jambi Tahun 2010-2019	X1: Pendapatan asli daerah X2: Dana alokasi umum Y1: Kemandirian daerah Y2: Pertumbuhan Ekonomi	Analisis jalur	Hasil penelitian menunjukkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh Negatif terhadap Kemandirian Daerah. Kabupaten/Kota

					<p>Provinsi Jambi tahun 2010-2019.</p> <p>Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh Negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2010-2019.</p> <p>Kemandirian Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2010-2019.</p>
--	--	--	--	--	--

					Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap kemandirian daerah tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada kabupaten/kota Provinsi Jambi Tahun 2010-2019.
7.	Dian Novianti dan Jouzar Farouq Ishak (2022)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bandung	X: Pendapatan asli daerah Y: Kemandirian keuangan daerah	analisis statistik deskriptif serta Analisis Regresi Linier Berganda.	Secara parsial Pajak Daerah memberikan pengaruh signifikan dengan arah yang positif terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Kota Bandung tahun 2016-2020. Secara parsial Retribusi Daerah

					<p>memberikan pengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Kota Bandung tahun 2016-2020.</p> <p>Secara parsial HPKD yang Dipisahkan tidak memberi pengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Kota Bandung tahun 2016-2020</p> <p>Secara parsial Lain-lain PAD yang Sah memberikan pengaruh signifikan dengan arah positif terhadap Kemandirian Keuangan</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>Pemerintah Kota Bandung tahun 2016-2020.</p> <p>Secara bersama-sama Pendapatan Asli Daerah berpengaruh yang signifikan dengan arah yang positif terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Kota Bandung.</p>
8.	R. Neneng Rina Andriani dan Nisa Noor Wahid (2018)	<p>Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 – 2015)</p>	<p>X1: Pendapatan asli daerah X2: Dana perimbangan Y: Kemandirian keuangan daerah</p>	<p>Analisis regresi berganda</p>	<p>Dana perimbangan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah</p> <p>Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara simultan berpengaruh</p>

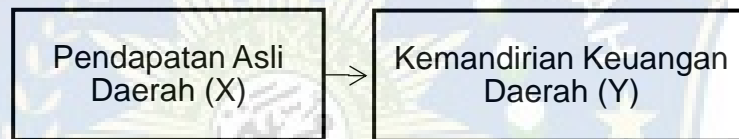
					terhadap kemandirian keuangan daerah.
9.	Rahmat Saleh (2020)	Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah	X1: Pendapatan asli daerah X2: Dana perimbangan Y: Kemandirian keuangan pemerintah daerah	Regresi linier Berganda	Pendapatan asli Daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan pemerintah Kabupaten Bogor 2012-2017. Dana perimbangan Berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan pemerintah kabupaten Bogor periode 2012-2017 dan seluruh variabel (Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan) berpengaruh positif Terhadap

					<p>kemandirian keuangan daerah secara bersama-sama dengan demikian artinya semakin meningkatnya Pendapatan Asli daerah dan sedikitnya dana perimbangan maka akan meningkatnya kemandirian keuangan daerah pada pemerintah kabupaten Bogor periode 2012-2017</p>
10.	Eva Ida Malau dan Eka Pratiwi Septania Parapat (2020)	Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah	X1: Pendapatan asli daerah X2: Belanja Modal Y: Kemandirian keuangan daerah	Analisi data regresi panel	Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, sebaliknya belanja modal berpengaruh negatif terhadap kemandirian

					keuangan daerah
--	--	--	--	--	-----------------

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir pada penelitian ini adalah pendapatan asli daerah yg berasal dari perekonomian asli dari daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil penegelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Untuk Melihat pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah maka kerangka pikir penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1

Kerangka Pikir

Dari bagan diatas penulis menyimpulkan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kemandirian daerah.

D. Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian keuangan daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri yang digunakan untuk keperluan daerah seperti pembangunan, pengembangan, dan kepentingan publik lainnya. Sebisa mungkin daerah meminimalisir ketergantungannya

terhadap pemerintah pusat/ provinsi. Tingkat kemandirian suatu daerah dilihat dari seberapa besar penerimaan PAD daerah tersebut, PAD digunakan untuk memperoleh sumber-sumber penerimaan yang digunakan sebagai tolak ukur kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya dan mengembangkan perekonomian daerahnya (Okatavi dan Nur Handayani, 2021).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Merupakan tolak ukur utama dalam mengatur tingkat kemandirian keuangan suatu daerah. Semakin besar PAD dibandingkan dengan bantuan yang diberikan pemerintah pusat, semakin tinggi pula tingkat kemandirian suatu daerah, tingkat kemandirian ini ditunjukkan dengan besarnya kontribusi PAD untuk membiayai seluruh bentuk pembangunan dan belanja daerahnya (Arpani dan Halnawati, 2020).

Hal itu sesuai dengan penelitian yang dilakukan Pantun Bukit (2022) dan Cindi Oktavia dan Nur Handayani (2021), Arpani dan Halnawati, (2020) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Dari uraian tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini adalah

H: Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah kabupaten Soppeng

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan adalah penelitian Kuantitatif. Metode pendekatan kuantitatif merupakan metode yang meneliti sampel yang telah ditentukan dengan menggunakan Teknik pengambilan data sesuai kebutuhan penelitian sehingga dapat menguji kebenaran dari hipotesis penelitian dan membuat kesimpulan hasil pengujian

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) yang berada di Jl. Salotungo No. 3, Watansoppeng, Sulawesi Selatan. Waktu penelitian berlangsung dalam kurun waktu 2 Bulan ditahun 2023

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder ialah data yg diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya atau data yang diterima dari bagian lain dalam bentuk bukti catatan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan di penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode dokumentasi yaitu melakukan penulisan atau menghimpun catatan dan melakukan riset data sekunder.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah data Pendapatan asli daerah Kabupaten Soppeng tahun 2013-2022

2. Sampel

Sampling Jenuh adalah teknik pemilihan sampel apabila semua anggota populasi dijadikan sampel. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Teknik Sampling Jenuh, dimana semua populasi dalam penelitian ini dijadikan sampel (Sugiyono, 2019). Sampel dalam penelitian ini adalah data Pendapatan asli daerah Kabupaten Soppeng tahun 2013-2022.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan di penelitian ini yaitu Dokumentasi, dimana data yang diambil secara tidak langsung atau lewat Buku, Arsip, Dokumen atau media perantara internet

F. Defenisi Operasional Variabel

1. Variabel Independen (Variabel bebas) adalah variabel yang mempengaruhi atau penyebab timbulnya perubahan Dependen (Variabel terikat). Variabel Independen dalam penelitian ini adalah:

X= Pendapatan Asli Daerah

2. Variabel Dependen (Variabel terikat) adalah variabel yang dipengaruhi sebagai akibat dari adanya variabel bebas. Dikatakan variabel terikat

karena variabel tersebut dipengaruhi oleh variabel Independen (Variabel bebas). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah:

Y= Kemandirian Keuangan Daerah.

G. Metode Analisis Data

mencari kemandirian keuangan daerah menggunakan rumus yang ada dibawah:

$$\text{Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer pusat/provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100 \%$$

Metode analisis data yang digunakan adalah model analisis statistik dengan menggunakan SPSS 25. maka terlebih dahulu melakukan

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam regresi, variabel pengganggu atau remaininl memiliki distribusi normal atau sebaliknya. Model analisis yang dipergunakan dalam menjalankan pengujian yaitu One-Sample Kolomogrov-Smirnov Test. Model regresi disebut mempunyai residual berdistribusi normal jika Asymp. Signifikasi Sig (2-tailed) sebesar 0,05.

b. Uji Autokorelasi

Asumsi autokorelasi diuji menggunakan uji DW (Durbin Watson). Nilai DW sebagai patokan dalam menilai terlepas dari apakah ada autokorelasi. Secara garis besar pengukuran nilai DW dalam melakukan pengecekan autokorelasi yaitu: a. Nilai DW lebih kecil dari 2 berarti ada hubungan positif. b. Nilai DW disekitar 2 sampai

+2 menampilkan tidak adanya autokorelasi. c. Nilai DW lebih besar +2 menampilkan adanya autokorelasi negatif.

- c. Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui bahwa telah ditemukan linear disekitar variabel independen. Sama halnya dengan yang dijelaskan Santoso dalam Ivan Fadillah, 2021, jika setiap variabel memiliki hubungan yang sempurna maka model kuadrat terkecil tidak berguna. Metode yang digunakan dalam pengecekan terkait dengan multikolinearitas ialah dengan memakai nilai Value Inflation Faktor (VIF). Dimana: a. Toleransi value $< 0,01$ atau $VIF > 10 \rightarrow$ terjadi multikolinearitas b. Toleransi value $> 0,01$ atau $VIF < 10 \rightarrow$ tidak terjadi multikolinearitas.
- d. Uji Heteroskedastisitas Asumsi pokok dari model regresi linier klasik ialah hambatan didalam regresi adalah heteroskedastisitas. (Santoso dalam Ivan Fadillah, 2021) mengemukakan bahwa uji heterokedastisitas dilakukan dalam mengukur apakah dalam model regresi terdapat varians yang berbeda dari residual satu observasi ke observasi lainnya. Uji heteroskedastisitas digunakan dengan menguji Park. Bila nilai hitung $< t_{tabel}$ maka dari itu akan timbul homoskedastisitas yaitu versi variabel independennya yaitu konstan untuk setiap nilai tertentu variabel independen. Sebaliknya, apabila nilai hitung $> t_{tabel}$, berarti terjadi heteroskedastisitas

H. Uji Hipotesis

Pengujian penelitian ini menggunakan analisis sederhana karena terdiri dari satu variabel independen dan satu variabel dependen.

Analisis regresi sederhana bertujuan untuk mengukur hubungan variabel independen dan variabel dependen. Uji koefisien determinasi (R^2)

Uji R^2 atau disebut juga koefisien determinasi adalah nilai yang menggambarkan berapa kemampuan atau derajat distribusi variabel bebas dalam menerangkan atau menjelaskan variabel yang terikat dalam kemampuan yang terhubung atau mengukur kedekatan hubungan antara faktor bebas dan variabel dependen. Besarnya nilai R^2 diantara nol dan satu ($0 < R^2 < 1$). Model sudah baik dan tingkat keeratan antara variabel bebas dengan variabel terikat semakin dekat jika nilainya semakin mendekati satu. Pemilihan variabel X atas Y benar jika koefisien determinasinya lebih besar dari 0,5. Pemilihan variabel X untuk Y tidak tepat jika koefisien determinasinya kurang dari 0,5 (Santoso dalam Ivan Fadillah, 2021).

1. Uji Signifikasi Parsial (Uji-t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa besar kontribusi variabel independen terhadap penjelasan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,05 ($\alpha=5\%$). Untuk pengambilan keputusan terkait hipotesis dapat diterima atau ditolak sebagai berikut:

- a. Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresi yang tidak signifikan). Artinya variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen

- b. Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Artinya secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Santoso dalam Ivan Fadillah,2021)



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak dan Kondisi Geografis Kabupaten Soppeng

Kabupaten Soppeng adalah salah satu kabupaten yang ada disulawesi selatan dan memiliki luas 1.500 km², secara geografis Kabupaten Soppeng terletak pada 4o06-4o32 LS dan antara 119o42 18-120o06 BT dengan Batas wilayah: sebelah Utara berbatasan dengan Kabupates Sidenreng Rappang, sebelah Timur Berbatasan dengan kabupaten Bone dan Kabupaten Wajo, sebelah Selatan berbatasan dengan kabupaten Bone dan sebelah Barat berbatasan dengan kabupeten Barru.

Kabupaten Soppeng terletak pada depresiasi sungai Walanae yang terdiri dari daratan dan perbukitan dengan luas daratan ±700 Km² serta berada pada ketinggian rata-rata antara 100-200 m diatas permukaan laut. Ibu Kota Kabupaten Soppeng adalah Watansoppeng yang berada pada ketinggian 120 m diatas permukaan laut. Kabupaten Soppeng tidak memiliki wilayah pantai, gunung yang ada diwilayah kabupaten Soppeng menurut ketinggiannya adalah sebagai berikut:

- a. Gunung Nene Conang (1463 m)
- b. Gunung Laposo (1000 m)
- c. Gunung Sewo (860)
- d. Gunung Lapancu (850)
- e. Gunung Bulu Dua (800)
- f. Gunung Paowengeng (760 m)

Kabupaten Soppeng memiliki tempat-tempat wisata berupa permandian air panas bumi yang bernama “Lejja”, permandian mata Air “Ompo” dan permandian alam “Citta”.

2. Badan Pengelolaan keuangan dan Pendapatan Daerah

Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan pendapatan daerah Kabupaten Soppeng berkedudukan di jalan Salotungo. Pembentukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng dimulai pada tahun 2012. Legalitas pembentukan dan operasional SKPD ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng nomor 65 tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Kabupaten Soppeng Nomor 24 Tahun 2014 tentang uraian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

a. Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng.

1. Visi

Mewujudkan Pengelolaan dan Keuanagn Daerah yang Profesional, Tertib dan Akuntabel

2. Misi

- a) Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang handal dengan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional, terarah dan terpadu.
- b) Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparatur dalam merumuskan kebijakan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif dan efisien.
- c) Memperkuat koordinasi dan hubungan kerja dengan instansi/satuan kerja pengelolah keuangan dan aset daerah maupun dengan pemerintah pusat.

b. Tugas pokok badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah

1. Kepala Badan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan yang menjadi urusan pemerintah daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengoordinasikan, dan melaksanakan program dan kegiatan urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan keuangan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Sub Bagian Umum

Sub bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam memimpin, menyiapkan bahan, menghimpun, mengelola dan melaksanakan administrasi urusan ketatausahaan Bidang dan pengelolaan urusan umum

kepegawaian yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

b. Sub bagian perencanaan dan pelaporan

Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam memimpin, menyiapkan bahan, menghimpun, mengelola dan melakukan administrasi urusan perencanaan dan pelaporan serta melakukan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan pelaporan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

c. Sub Bagian Keuangan

Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam memimpin, menyiapkan bahan, menghimpun, mengolah dan melakukan administrasi keuangan atau penatausahaan keuangan meliputi penyusunan anggaran, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, dan pelaporan keuangan yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

3. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan

daerah yang terkait dengan Bidang Anggaran yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- a. Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran belanja Operasi.

Subbidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja Operasi dan Tidak Terduga dipimpin oleh Kepala Subbidang, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Anggaran dalam memimpin, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja Operasi dan Tidak Terduga yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- b. Sub Bidang perencanaan dan penyusunan anggaran beanja modal.

Sub bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja Modal dipimpin oleh Kepala Subbidang, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Anggaran dalam memimpin, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja Modal yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Bidang Perbendaharaan dan pengelolaan kas

Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terkait dengan Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

a. Sub Bidang Perbendaharaan

Sub bidang Perbendaharaan dipimpin oleh Kepala Subbidang, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas dalam memimpin, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Perbendaharaan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Sub Bidang Pengelolaan Kas

Subbidang Pengelolaan Kas dipimpin oleh Kepala Subbidang, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas dalam memimpin, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan

kegiatan Subbidang Pengelolaan Kas yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi dipimpin oleh Kepala Bidang membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terkait dengan Bidang Akuntansi yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

a. Sub Bidang Akuntansi

Sub bidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas dipimpin oleh Kepala Subbidang, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Akuntansi dalam memimpin, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

b. Sub Bidang Penyusunan Laporan Keuangan

Sub bidang Penyusunan Laporan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbidang, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Akuntansi dalam memimpin, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan

dan melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Penyusunan Laporan Keuangan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Bidang Pengelolaan barang milik negara

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang, membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terkait dengan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Sub Bidang Analisis kebutuhan

Sub bidang Analisis Kebutuhan dipimpin oleh Kepala Subbidang, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam memimpin, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Analisis Kebutuhan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

b. Sub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Barang milik

Sub bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah dipimpin oleh Kepala Subbidang, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik

Daerah dalam memimpin, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



B. Hasil Penelitian

Data Yang digunakan adalah data sekunder Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang diperoleh dari Web <https://djpk.kemenkeu.go.id/> Kabupaten Soppeng tahun 2013-2022.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dari ekonomi asli daerah yang berupa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah.

Tabel 4.1
Jumlah PAD Kabupaten Soppeng Tahun 2013-2022

Tahun	Jumlah PAD
2013	Rp 40.096.283.908,94
2014	Rp 60.544.221.463,67
2015	Rp 68.403.420.035,55
2016	Rp 91.123.526.502,24
2017	Rp 125.892.548.021,00
2018	Rp 131.607.491.253,80
2019	Rp 138.447.182.181,68
2020	Rp 151.860.141.337,87
2021	Rp 155.455.225.345,90
2022	Rp 69.967.446.873,09

Sumber: <https://djpk.kemenkeu.go.id/>

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa kabupaten Soppeng berhasil mempertahankan efektifitas penerimaan PAD tahun 2018-2022. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Soppeng mampu memaksimalkan potensi Pendapatan daerah dengan meningkatkan penerimaan PAD dari berbagai sumber.

2. Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan kepada masyarakat yang telah membayar pajak, retribusi daerah sebagai sumber pendapatan daerah yang dibutuhkan. Besar kemandirian keuangan daerah dalam penelitian ini dapat diukur dengan menggunakan rumus:

Tabel 4.2
Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Soppeng tahun 2013-2022

Tahun	PAD	Transfer Pusat + Pinjaman	Persentase
2013	Rp 40.096.283.908,94	Rp 598.157.576.584,00	6,70 %
2014	Rp 60.544.221.463,67	Rp 635.227.489.289,00	9,53 %
2015	Rp 68.403.420.035,55	Rp 741.164.342.734,00	9,23 %
2016	Rp 91.123.526.502,24	Rp 1.014.280.208.517,00	8,98 %
2017	Rp 125.892.548.021,00	Rp 927.905.872.664,00	13,57 %
2018	Rp 131.607.491.253,80	Rp 887.177.620.412,00	14,83 %
2019	Rp 138.447.182.181,68	Rp 899.763.975.382,00	15,39 %
2020	Rp 151.860.141.337,87	Rp 854.758.766.531,00	17,77 %
2021	Rp 155.455.225.345,90	Rp 970.643.355.351,00	16,02 %
2022	Rp 69.967.446.873,09	Rp 454.711.948.374,00 + Rp 140.289.877.560,00	11,76 %

Sumber: <https://djpk.kemenkeu.go.id/>

Pada tabel diatas bahwa tingkat kemandirian keuangan kabupaten soppeng pada tahun 2013-2022 masih terbilang sangat rendah karena berada dikisaran 0-25 %. pada tahun 2013-2020 tingkat kemandirian kabupaten soppeng tiap tahun mengalami naik turun, dapat dilihat pada tahun 2013-2015 tingkat kemandirian senantiasa meningkat

sekitar 1% setiap tahunnya, kemudian turun lagi pada tahun 2016, lalu tahun 2017-2020 mengalami kenaikan yang mencapai tingkat kemandirian tertinggi yaitu 17,77% pada tahun 2020 dan tahun berikutnya 2021 dan 2022 mengalami penurunan. Tingkat kemandirian terendah pada tahun 2013 dengan tingkat kemandirian hanya 6,70% dan tingkat kemandirian tertinggi pada tahun 2020 dengan mencapai angka 17,77%.



C. Hasil Analisis Data

1. Hasil Uji Asumsi Klasik

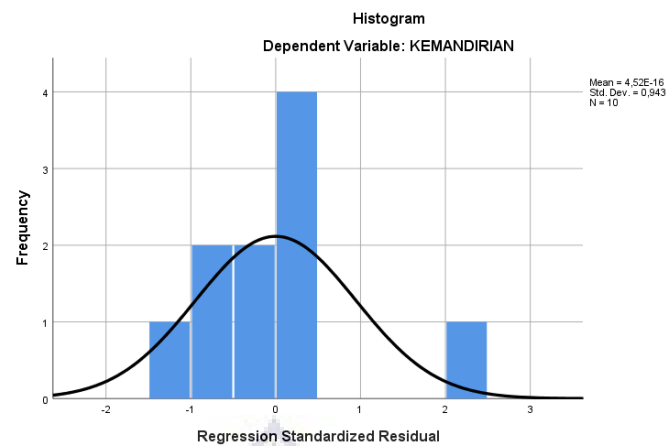
a. Uji Normalitas

Tabel 4.3
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		10
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000488
	Std. Deviation	88622364935,0 3850000
Most Extreme Differences	Absolute	,268
	Positive	,268
	Negative	-,131
Test Statistic		,268
Asymp. Sig. (2-tailed)		,041 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: Olah data SPSS (2023)

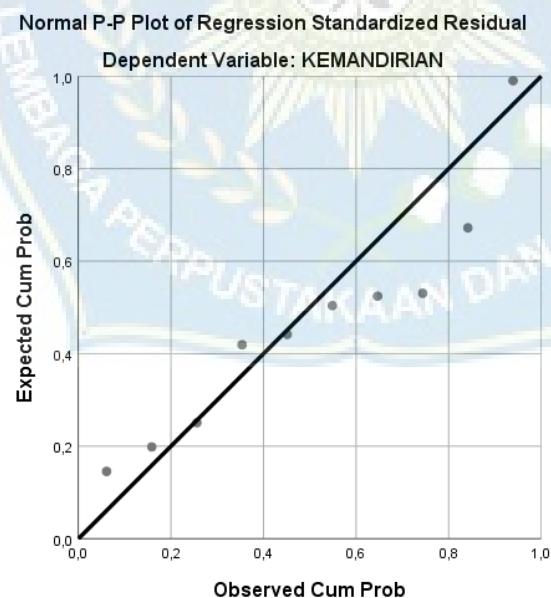
Pada Tabel diatas dapat dilihat hasil uji *One Sample Kolmogrov-Smimov* Yang menunjukkan bahwa diperoleh nilai signifikasi Asymp.Sig (2-tailed) sebesar 0.041. Data pannelitian dikatakan normal apabila nilai signifikan > 0.05 , Maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian berdistribusi dengan normal.



Sumber: Olah data SPSS (2023)

Gambar 4.1
Histogram Hasil Uji Normalitas

Dapat dilihat dari Uji Grafik Histogram, Frekuensi residual paling banyak mengumpul pada nilai 0 atau nilai penyebaran sesuai dengan kurva normal sehingga dikatakan bahwa residual sudah menyebar secara normal.



Sumber: Data diolah 2023

Gambar 4.2
Uji P-P Plot

Dari gambar diatas, hasil Uji P-P Plot dapat dilihat titik-titik data sudah menyebar mengikuti garis diagonal yang menunjukkan bahwa residual sudah menyebar secara normal

b. Uji Multikolinieritas

Tabel 4.4
Hasil Uji Multikolinieritas

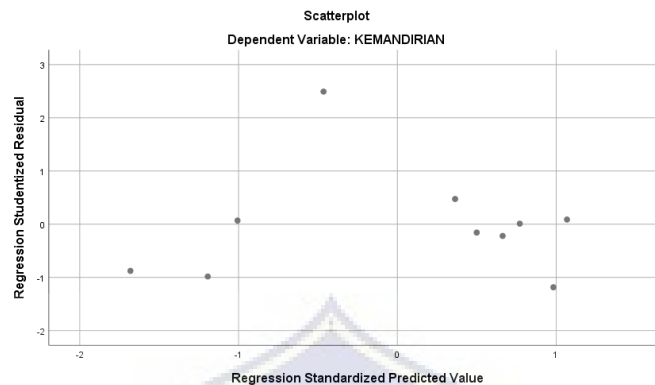
Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	556301958395,313	87793273821,074		6,336	,000		
	PAD	2,619	,747	,778	3,508	,008	1,000	1,000

a. Dependent Variable: KEMANDIRIAN

Sumber: Olah data SPSS (2023)

Tabel hasil Uji Multikolinearitas semua variabel memperoleh nilai tolerance sebesar 1,000 dan nilai VIF sebesar 1,000. Jika nilai tolerance >0,1 dan VIF < 10 maka tidak terjadi Multikolinearitas. Sehingga dapat disimpulkan pada data penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Olah data SPSS (2023)

Gambar 4.3
Scatterplot

Berdasarkan pada gambar diatas hasil sescatterplot dapat diketahui bahwa titik-titik tersebar disekitar angka 0, atau tidak berkumpul diatas atau dibawah 0. Sehingga disimpulkan data penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Tabel 4.5
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,778 ^a	,606	,557	93998212815,5 3197	1,494
a. Predictors: (Constant), PAD					
b. Dependent Variable: KEMANDIRIAN					

Sumber: Olah data SPSS (2023) Pada Tabel diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1,494 maka dapat disimpulkan tidak ada gejala autokorelasi dengan dasar pengambilan keputusan $du(1.3197) < DW(1,494) > 4-du(2,6803)$.

2. Uji Hipotesis

Uji Hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier sederhana. Sebelum melakukan analisis linier sederhana, perlu melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun variabel independen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (X) dan Kemandirian Keuangan Daerah (Y), uji hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 4.6
Hasil Uji R²

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,778 ^a	,606	,557	93998212815,5 3197

a. Predictors: (Constant), PAD

Sumber: Olah data SPSS (2023)

Berdasarkan tabel Menunjukkan Bahwa nilai R Square model sebesar 0,606 atau 60,6 % Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah berpengaruh sebesar 60,6 % terhadap variabel dependen yaitu Kemandirian Keuangan Daerah sedangkan sisanya 39,4 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

b. Uji Parsial (Uji T)

Untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah mempunyai pengaruh signifikan maka dilakukan Uji T .

Tabel 4.7
Hasil Uji T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	556301958395,313	87793273821,074		6,336	,000
	PAD	2,619	,747	,778	3,508	,008

a. Dependent Variable: KEMANDIRIAN

Sumber: Olah data SPSS (2023)

Proses pengujian dilakukan dengan melihat pada kolom signifikan dan nilai t ditabel dengan menggunakan tingkat signifikan (α) sebesar 5% atau 0,05. Adapun dasar pengambilan keputusan yaitu:

- Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka Hipotesis ditolak
- Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka Hipotesis diterima

Berdasarkan hasil olah data diatas maka dapat diketahui bahwa:

nilai signifikan $0,08 > 0,05$ dan nilai t hitung Pendapatan asli daerah lebih adalah 3,508 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,85955. Maka hipotesis ditolak atau dengan kata lain dapat disimpulkan secara

parsial bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

D. Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil pengujian penelitian diatas maka hipotesis tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah dikabupaten Soppeng. Hal ini ditunjukkan berdasarkan nilai t hitung dari pendapatan asli daerah adalah 3,508 lebih besar dari nilai t tabel dengan jumlah 1,85955 dan nilai signifikan sebesar $0,08 > 0,05$ maka hipotesis ditolak. Dapat dilihat dari penelitian tersebut bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah Kabupaten Soppeng.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Pantun Bukit (2022), Cindi Oktavia dan Nur Handayani (2021), Arpani dan Halnawati, (2020) yang menunjukkan bahwa pendapatana asli daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah Kabupaten Soppeng selama 10 tahun terakhir sebesar 60,6 % dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Berdasarkan data yang diperoleh BPKPD Kabupaten Soppeng dan Web DJPK didapatkan fakta bahwa sebagian besar pendapatan asli daerah masih didominasi oleh dana perimbangan dengan tingkat kemandirian tertinggi sebesar 17,7%. mengindikasikan bahwa Kabupaten Soppeng belum dikatakan mandiri karena adanya ketergantungan terhadap pemerintah pusat dalam membiayai dalam kegiatan daerah.

Berdasarkan realita tersebut, penting bagi pemerintah daerah untuk menaruh perhatian yang lebih besar dalam mengoptimalkan penerimaan PAD sesuai dengan potensi yang dimiliki karena PAD merupakan sumber dari pembiayaan yang harus betul-betul dari daerah itu sendiri. Bahkan lebih dari itu terkait bagaimana langkah pemerintah daerah bisa meningkatkan potensi PAD dimasa yang akan datang dan meminimalisir transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan..



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan mengenai pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah Kabupaten tahun 2013-2022, dengan nilai signifikan sebesar $0,08 > 0,05$ dan kontribusinya sebesar 60,6% dan dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah kabupaten Soppeng.

B. Saran

Setelah mengambil kesimpulan dari hasil penelitian mengenai pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah kabupaten soppeng, semoga pemerintah bisa meningkatkan lagi potensi penerimaan pendapatan asli daerah kabupaten soppeng sehingga kabupaten soppeng bisa masuk dalam kategori mandiri dan kabupaten soppeng bisa lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

Saran bagi peneliti selanjutnya semoga bisa dijadikan bahan referensi untuk melakukan penelitian dikabupaten soppeng dan semoga peneliti selanjutnya melakukan penelitian yang sama dengan menambahkan variabel lain dan tahun yang berbeda

sehingga kita bisa melihat perubahan yang terjadi di kabupaten Soppeng.



DAFTAR PUSTAKA

- Amalia Fauziah N, A., & Haryanto. (2019). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2017. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(2), 1–13.
- Andriani, R. N. R., & Wahid, N. N. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah (studi kasus pada pemerintah kota tasikmalaya tahun 2006–2015). *Jurnal Akuntansi*, 13(1),
- Arpani, W. N., & Halmawati, H. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2373-2390.
- Bukit, P. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2010-2019. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(1), 325. <https://doi.org/10.33087/jjubj.v22i1.2036>
- Haryanto, H. (2019). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2017. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(2).
- Indah, S.N., (2022). Analisis tingkat Kemandirian keuangan Daerah dan Efektivitas PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia pada Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun 2006-2020, Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
- Ivan, Fadillah (2021) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemandirian Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2019, Skripsi Thesis, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia
- Kristina, S. R., Naukoko, A. T., & Siwu, H. F. D. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(1).
- Malau, E. I., & Simarmata, E. P. S. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (EK&BI)*, 3(2), 332–337. <https://doi.org/10.37600/ekbi.v3i2.196>
- Novianti, D., & Ishak, J. F. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bandung.

Indonesian Accounting Research Journal, 2(3), 244–250.
<https://doi.org/10.35313/iarj.v2i3.4127>

Oktavia, C., & Handayani, N. (2021). Pengaruh PAD, Tax Effort, Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(3).

Saleh, R. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah. In *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik* (Vol. 15, Issue 2, pp. 111–134). <https://doi.org/10.25105/jipak.v15i2.6226>

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Wasil, M., Putri, N. S., Larasati, A., & Mufida, N. (2020). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Sidoarjo. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 1(2), 99–109.
<https://doi.org/10.26905/jrei.v1i2.5441>

Verginia, Monica. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Tugas Akhir. Politeknik Negeri Padang.

<https://Bpkpd.soppeng.go.id/visi-dan-misi/>



Lampran 1

Surat permohonan izin dari Fakultas



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 617/05/A.2-II/V/44/2023 Makassar, 09 Mei 2023

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar

Di-
Tempat

Dengan Hormat

Dalam rangka proses penelitian dan penulisan skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Muhammad Ishak
Stambuk : 105731109019
Jurusan : Akuntansi
Judul Penelitian : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Soppeng

Dimohon kiranya mahasiswa tersebut dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai tempat mahasiswa tersebut melakukan penelitian

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terimakasih.



Andi Jam'an, S.E., M.Si
NBM 651507

Tembusan:

1. Rektor Unismuh Makassar
2. Arsip

Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp. 0411-866972 Fax. 0411-865588 Makassar 90221
Gedung Iqra Lantai 7 Kampus Talasalapang Makassar - Sulawesi Selatan

Surat Permohonan Izin dari LP3M


MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
 LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Soekarno-Aminuddin No. 234 Telp. 8499772 Fax. (041) 3861089 Makassar 90221 e-mail: lp3m@umh.ac.id

Nomor : 1457/05/C.4-VIII/V/1444/2023 19 Syawal 1444 H
 Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal 09 May 2023 M
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
 Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
 di -
 Makassar



Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 617/05/A2.41/V/44/2023 tanggal 9 Mei 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD ISHAK
 No. Stambuk : 10573.1109019
 Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 Jurusan : Akuntansi
 Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

"PENGARUH PENDAPATAN ASIA DAERAH TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 12 Mei 2023 s/d 12 Juli 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran



Ketua LP3M,

 Dr. Iqbal Abubakar Idhan, MP.
 NBM 1017716



05-23

Surat Izin dari PTSP Provinsi Sul-sel



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor : **16269/S.01/PTSP/2023** Kepada Yth.
 Lampiran : - Bupati Soppeng
 Perihal : Izin penelitian

di-
 Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1457/05/C.4-VIII/V/1444/2023 tanggal 09 Mei 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **MUHAMMAD ISHAK**
 Nomor Pokok : 105731109019
 Program Studi : Akuntansi
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
 Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH
 KABUPATEN SOPPENG "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **12 Mei s/d 12 Juli 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada Tanggal 12 Mei 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
 PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Drs. MUH SALEH, M.Si.
 Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA
 Nip : 19690717 199112 1002

Tembusan Yth
 1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
 2. *Pertinggal.*

Surat Izin dari PTSP KabupatenSoppeng



SRN CO0004923

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jl. Salotungo No. 2 Tlp. 0484 - 23743 Watansoppeng 90812

IZIN PENELITIAN
Nomor : 179/IP/DPMTNT/V/2023

DASAR 1. Surat Permohonan **MUHAMMAD ISHAK** Tanggal **17-05-2023**
2. Rekomendasi dari **BAPPELITBANGDA**
Nomor **142/IP/REK-T.TEKNIS/BAP/V/2023** Tanggal **19-05-2023**

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : MUHAMMAD ISHAK
UNIVERSITAS/ LEMBAGA : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jurusan : AKUNTANSI
ALAMAT : SAWILE, KEC. MARIORIWAWO
UNTUK : melaksanakan Penelitian :

JUDUL PENELITIAN : PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG

LOKASI PENELITIAN : KANTOR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

JENIS PENELITIAN : KUANTITATIF
LAMA PENELITIAN : 29 Mei 2023 s.d 29 Juli 2023

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung dan dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada Tanggal : **24 Mei 2023**
An. BUPATI SOPPENG
KEPALA DINAS



ANDI DHAMRAH, S.Sos, M.M
Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA
NIP : 19700815 199803 1 007



Biaya : Rp. 0,00

■ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BKIK BPPT**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPPTSP-NAKERTRANS Kabupaten Soppeng (scan QRCode)



Surat balasan dari BPKPD kabupaten Soppeng

Lampiran 2

Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dinisahkan	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
2013	Rp 40.096.283.908,94	Rp 4.282.983.683,00	Rp 8.637.486.091,00	Rp 3.670.935.267,00	Rp 23.504.878.867,94
2014	Rp 60.544.221.463,67	Rp 10.417.526.141,00	Rp 9.553.787.677,00	Rp 6.331.166.186,00	Rp 34.241.741.459,67
2015	Rp 68.403.420.035,55	Rp 11.219.938.145,00	Rp 6.337.436.671,00	Rp 8.452.817.334,40	Rp 42.393.227.885,15
2016	Rp 91.123.526.502,24	Rp 11.945.173.586,00	Rp 8.127.529.236,00	Rp 13.050.651.239,00	Rp 58.000.172.441,24
2017	Rp 125.892.548.021,00	Rp 14.730.111.288,00	Rp 8.072.513.217,00	Rp 15.056.096.674,38	Rp 88.033.826.841,62
2018	Rp 131.607.491.253,80	Rp 17.390.063.699,00	Rp 8.056.636.361,00	Rp 14.338.442.084,00	Rp 91.822.349.109,80
2019	Rp 138.447.182.181,68	Rp 19.178.664.780,80	Rp 6.646.739.915,00	Rp 16.688.437.676,00	Rp 95.933.339.809,88
2020	Rp 151.860.141.337,87	Rp 19.481.179.569,70	Rp 6.264.366.345,50	Rp 18.396.001.683,00	Rp 107.718.593.739,67
2021	Rp 155.455.225.345,90	Rp 20.151.052.607,00	Rp 10.462.038.543,00	Rp 19.163.344.683,00	Rp 105.678.789.512,90
2022	Rp 142.984.979.837,03	Rp 24.214.869.864,00	Rp 5.652.120.152,00	Rp 16.409.490.091,00	Rp 96.078.499.730,03

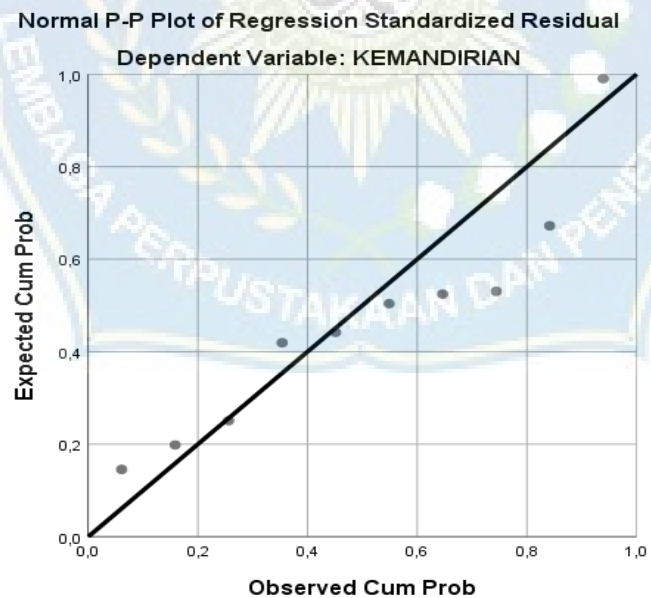
Kemandirian Keuangan Daerah

Tahun	PAD	Transfer Pusat + Pinjaman	Persentase
2013	Rp 40.096.283.908,94	Rp 598.157.576.584,00	6,70 %
2014	Rp 60.544.221.463,67	Rp 635.227.489.289,00	9,53 %
2015	Rp 68.403.420.035,55	Rp 741.164.342.734,00	9,23 %
2016	Rp 91.123.526.502,24	Rp 1.014.280.208.517,00	8,98 %
2017	Rp 125.892.548.021,00	Rp 927.905.872.664,00	13,57 %
2018	Rp 131.607.491.253,80	Rp 887.177.620.412,00	14,83 %
2019	Rp 138.447.182.181,68	Rp 899.763.975.382,00	15,39 %
2020	Rp 151.860.141.337,87	Rp 854.758.766.531,00	17,77 %
2021	Rp 155.455.225.345,90	Rp 970.643.355.351,00	16,02 %
2022	Rp 142.984.979.837,03	Rp 931.660.464.598,00 + Rp 140.289.877.560,00	13,34 %

Lampiran 3

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		10
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000488
	Std. Deviation	88622364935,0 3850000
Most Extreme Differences	Absolute	,268
	Positive	,268
	Negative	-,131
Test Statistic		,268
Asymp. Sig. (2-tailed)		,041 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

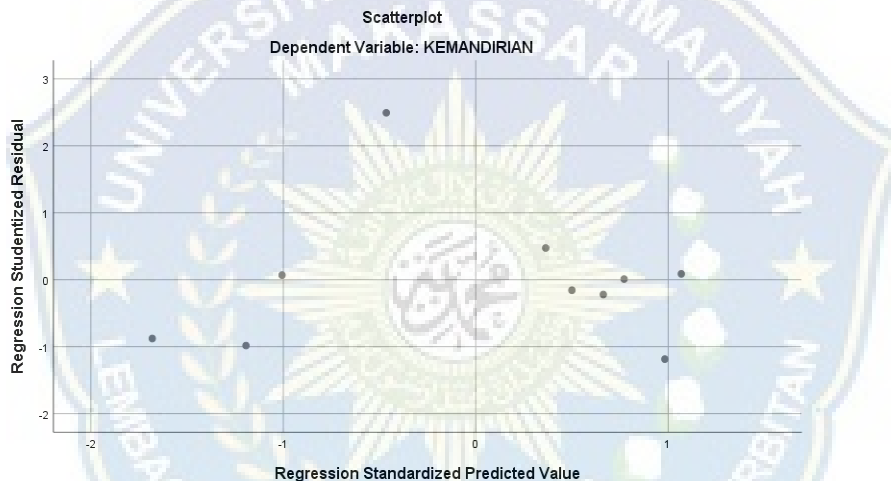


Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	556301958395,313	87793273821,074		6,336	,000		
	PAD	2,619	,747	,778	3,508	,008	1,000	1,000

a. Dependent Variable: KEMANDIRIAN

Uji Heteroskedasitas



Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,778 ^a	,606	,557	93998212815,5 3197	1,494

a. Predictors: (Constant), PAD

b. Dependent Variable: KEMANDIRIAN

Uji Koefisien determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,778 ^a	,606	,557	93998212815,5 3197

a. Predictors: (Constant), PAD

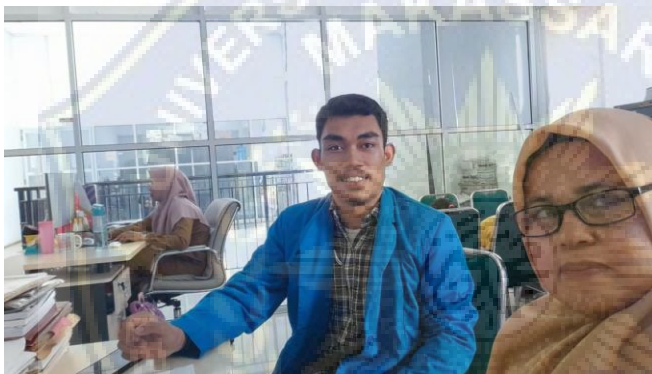
Uji T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	556301958395,313	87793273821,074		6,336	,000
	PAD	2,619	,747	,778	3,508	,008

a. Dependent Variable: KEMANDIRIAN

Lampiran 4

Dokumentasi Penelitian





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Muhammad Ishak
Nim : 105731109019
Program Studi : Akuntansi
Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	20 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5%

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.


Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 27 Juli 2023

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,





BAB I Muhammad Ishak -
105731109019

by Tahap Tutup

Submission date: 19-Jul-2023 07:15AM (UTC+0700)

Submission ID: 2133307529

File name: BAB_1_2.docx (34.84K)

Word count: 783

Character count: 5345

BAB I Muhammad Ishak - 105731109019

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repositori.usu.ac.id Internet Source	2%
2	repositori.ampta.ac.id Internet Source	2%
3	vdocuments.site Internet Source	2%
4	www.scribd.com Internet Source	2%
5	Submitted to Bellevue Public School Student Paper	2%

Exclude quotes OnExclude matches <2%Exclude bibliography On

BAB II Muhammad Ishak -
105731109019
by Tahap Tutup



Submission date: 19-Jul-2023 07:15AM (UTC+0700)

Submission ID: 2133307790

File name: BAB_2_2.docx (54.36K)

Word count: 1556

Character count: 10566

BAB II Muhammad Ishak - 105731109019

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

28%

INTERNET SOURCES

19%

PUBLICATIONS

14%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	download.garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	5%
2	repository.unhas.ac.id Internet Source	2%
3	www.jurnal.stas.ac.id Internet Source	2%
4	jurnal-umsi.ac.id Internet Source	2%
5	masalahkeuanga daerah.blogspot.com Internet Source	2%
6	id.scribd.com Internet Source	2%
7	www.kompasiana.com Internet Source	2%
8	text-id.123dok.com Internet Source	2%
9	ejournal.ijar-iaikapd.or.id Internet Source	2%

BAB III Muhammad Ishak -
105731109019

by Tahap Tutup



Submission date: 19-Jul-2023 07:16AM (UTC+0700)

Submission ID: 2133308030

File name: BAB_3_2.docx (35.17K)

Word count: 889

Character count: 5823

· BAB III Muhammad Ishak - 105731109019

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS


PRIMARY SOURCES

1	repository.upnyk.ac.id Internet Source	2%
2	Submitted to Universitas Musamus Merauke Student Paper	2%
3	e-journal.sari-mutiara.ac.id Internet Source	2%
4	e-journal.unipma.ac.id Internet Source	2%
5	repository.stiemahardhika.ac.id Internet Source	2%
6	repository.unp.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On



BAB IV Muhammad Ishak -
105731109019

by Tahap Tutup

Submission date: 19-Jul-2023 07:17AM (UTC+0700)

Submission ID: 2133308408

File name: BAB_4_2.docx (100,99K)

Word count: 1550

Character count: 9805

BAB IV Muhammad Ishak - 105731109019

ORIGINALITY REPORT

10%	14%	14%	12%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repositori.usu.ac.id Internet Source	3%
2	Submitted to Universitas Purera Batam Student Paper	2%
3	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%
4	pn-watansoppeng.go.id Internet Source	2%
5	Rahmad Suhendra, Muhammad Safri, Adi Bhakti. "Kemampuan fiskal daerah dan pengaruh belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Barat", e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah, 2019 Publication	2%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

BAB V Muhammad Ishak -
105731109019

by Tahap Tutup



Submission date: 19-Jul-2023 07:18AM (UTC+0700)

Submission ID: 2133308557

File name: BAB_5_1.docx (29.25K)

Word count: 144

Character count: 966

BAB V Muhammad Ishak - 105731109019

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES





Muhammad Ishak, Panggilan Ishak lahir di Sawile pada tanggal 02 Agustus 2001 dari pasangan suami istri Bapak Hatibe dan Ibu Rusdiah. Peneliti adalah anak ke tiga dari tiga (3) Bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Jl Mangga 1, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu SDN 279 Palakka tahun 2013, MTS DDI Langkemme tahun 2016, SMKN 2 Soppeng tahun

2019 dan mulai mengikuti program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Makassar dan pernah menjabat di beberapa organisasi internal dan external kampus. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

